

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Industri pertambangan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi terjadi karena adanya permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap komoditas sumber daya alam seperti mineral dan logam, sehingga mendorong perusahaan untuk mengembangkan industri pengelolaan hasil tambang. Selain itu, banyak wilayah di Indonesia yang menjadi perhatian para investor untuk mengadakan pertambangan karena melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Sejalan dengan ini, sejarah telah mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia pada akhirnya juga menggeser aktivitas ekonomi masyarakat, dari semula bertumpu pada sektor pertanian yang kemudian bersandar pada sektor industri (Hakim, 2009: 107).

Aktivitas industri tambang memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang hidup di kawasan industri. Meskipun pengaruhnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih meningkat, akan tetapi terhadap lingkungan justru tidak mendukung pada keberlanjutan hidup bagi ekosistemnya. Bagi komunitas lokal, ketersediaan lahan pertanian/perkebunan dan sumber daya alam adalah faktor penting dalam mendukung kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, area pertambangan yang luas seringkali mengambil alih lahan pertanian, perkebunan, dan area hutan yang termasuk tanah adat masyarakat. Kondisi ini seringkali menciptakan konflik yang panjang antar masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Ini dikarenakan masyarakat lokal kehilangan sumber kehidupan seperti lahan untuk mata pencaharian mereka (Kurnia dkk, 2022).

Dalam kasus yang seringkali terjadi biasanya terdapat di daerah perkotaan, pinggiran dan pedesaan. Salah satunya yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana daerah tersebut dikenal sebagai salah satu penghasil sumber daya alam. Terdapat perusahaan pertambangan yang menghasilkan mineral-mineral berkualitas seperti nikel. Perusahaan ini bergerak di bidang sektor pertambangan yang bertempat di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS). Kedua perusahaan yang berasal dari Cina di daerah ini dibangun sejak pada Tahun 2015.

Fakta yang ditemukan Dida (2016) menunjukkan sebelum berdirinya perusahaan pertambangan di Desa Morosi, masyarakat dan pihak perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama tentang pembangunan daerah seperti penerimaan karyawan diprioritaskan adalah masyarakat lokal, serta perbaikan infrastruktur, pembuatan gedung sekolah untuk pertukaran bahasa antara bahasa China dan bahasa Indonesia dan pembuatan sarana kesehatan.

Kemudian, dalam penelitian selanjutnya Lilis, dkk (2017) menunjukkan keberadaan perusahaan pertambangan di Desa Morosi secara tidak langsung dapat merangsang penduduk atau masyarakat setempat dalam memanfaatkan keadaan ini

untuk membangun usaha-usaha, sebagai peluang untuk bekerja di perusahaan dan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian tersebut dapat diartikan bahwa didirikannya industri tambang di daerah Kecamatan Morosi memperhatikan adanya potensi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Selaras dengan ini, menurut (Syaifullah 2009) keadaan masyarakat cenderung mengalami peningkatan pendapatan, dapat terjadi karena banyaknya anggota masyarakat yang terserap untuk bekerja pada sektor industri. Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa keberadaan industri memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dikatakan demikian, perkembangan industri berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi mereka yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Nyatanya, perkembangan industri pertambangan yang pesat tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Salah satunya dapat dilihat dari aktivitas perusahaan tambang di Kecamatan Kapoiala, yang mana perusahaan PT VDNI dan PT OSS melakukan pembukaan lahan atau perluasan area kawasan untuk produksi pertambangan. Untuk mengelola hasil tambang yaitu smelter, ini membutuhkan PLTU dalam rangkaian pengolahan bijih nikel di industri pertambangan. Produksi pertambangan yang dilakukan oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Kapoiala ini sangat memberikan dampak pengrusakan lingkungan yang cukup serius bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), diketahui PLTU OSS bersifat captive, atau pembangkit yang dioperasikan dan dimiliki sebuah perusahaan tertentu untuk menyuplai kebutuhan listriknya sendiri yang berdiri sejak 2018. PLTU Captive milik PT. OSS yang berada di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe menggunakan energi fosil batubara sebagai bahan bakar utama dalam pengoperasiannya. Proses pembakaran batu bara PLTU di daerah tersebut menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat lokal seperti masalah kesehatan akibat polusi udara. Dalam hasil riset WALHI Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa sejak beroperasinya perusahaan PT. OSS ini memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan di Desa Labota, Tani Indah, Lalimbue Jaya dan Kapoiala Baru (WALHI SULTRA, 2025).

Dalam hasil riset WALHI SULTRA juga menjelaskan salah satu faktor utama dibalik hitungan emisi adalah informasi kapasitas produksi per perusahaan dan pembangkit batu bara captive yang dimiliki. PT OSS diketahui mempunyai kapasitas produksi 3 juta ton produk baja stainless steel dan 2,2 juta ton ferronickel serta 1.620 megawatt PLTU captive. Dalam risetnya, CREA menganalisa dampak terkait infeksi saluran pernapasan bawah dan asma dikuantifikasikan sebagai risiko kematian dini akibat polusi udara paparan Particulate Matter (PM2.5) dari gas buangan smelter dan PLTU. Referensi perhitungan menggunakan fungsi risiko, paparan terhadap konsentrasi polusi udara dan respon kesehatan. Informasi tersebut dapat membantu memberikan pemahaman dalam mengetahui salah satu penyebab menurunnya kesehatan hingga mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal di sekitar industri

tambang di Kecamatan Kapoiala. Faktor-faktornya tidak lain disebabkan karena adanya PLTU Captive memproduksi nikel di wilayah Kapoiala.

Menurut Lembaga Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), kerusakan lingkungan sosial dibentuk oleh adanya proses pembakaran batu bara yang dilakukan tanpa henti menyisakan abu hitam yang kemudian bercampur dengan udara lalu menyebar ke lahan-lahan pertanian dan dihirup setiap hari oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, PLTU dikategorikan sebagai dampak kesehatan paling tinggi karena dianggap dapat menyebabkan banyaknya warga terkena penyakit ISPA akibat polusi udara. Seperti Peneliti CREA, Katherine Hasan mengatakan, di wilayah industri Smelter PT OSS-VDNI di Kabupaten Konawe, terdapat emisi polutan udara berbahaya seperti Particulate Matter (PM2.5), Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂), ketiga polutan udara ini berasal dari proses pembakaran PLTU Captive yang membahayakan kesehatan (MATALOKAL.COM, KONawe, 2024).

Terbukti dari hasil produktivitas tambak ikan dan udang milik warga di Kapoila, Kabupaten Konawe yang menurun drastis akibat keberadaan industri tambang di wilayah ini. Sejumlah petambak di daerah pesisir mengeluhkan dampak industri tambang nikel yang beroperasi di sekitar lingkungan mereka. Debu dari kendaraan, asap hitam beserta limbah cairan tambang diduga sebagai penyebab menurunnya produktivitas ikan dalam tambak, yang kemudian menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat lokal. (KOMPAS.id, 2019).

Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe (2015), menunjukan potensi perikanan pada tahun 2014 sangat besar di Kecamatan Kapoiala. Hal ini dapat dilihat dari analisis data produksi ikan bandeng yang mencapai 1.486 Ton dengan produktivitas 0,94 ton/ha. Komoditas selanjutnya adalah udang dengan produksi 27,8 Ton atau dengan produktivitas 0,20 ton/ha. Pada tahun yang sama, sebagian besar atau sebanyak 61,50 persen dari 3.062 penduduk di Kecamatan Kapoiala bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani, peternak, maupun nelayan. Informasi ini digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, agar dapat mengukur dampak dari pembangunan industri tambang dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat lokal di Kecamatan Kapoiala.

Pengamatan awal yang dilakukan di Desa Lalimbue jaya saat pertama kali menginjakkan kaki di Kapoiala, disana terlihat jelas dampak dari aktivitas pertambangan yang nampak oleh panca indra yaitu polusi udara. Beberapa kali melintas di jalan hauling dengan hanya menggunakan helm dan masker untuk menutup bagian kepala agar terhindar dari debu yang ditimbulkan aktivitas kendaraan tambang. Selain itu, disekitar kawasan tambang juga terlihat sangat jelas polusi asap hitam tebal yang muncul dari cerobong smelter dan PLTU. Kondisi ini tidak hanya menciptakan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat dalam aktivitas kesehariannya. Polusi yang diciptakan industri tambang di wilayah ini mengakibatkan orang yang berada disekitar itu merasakan batuk-batuk, flu dan mata menjadi merah.

Penelitian-penelitian yang menyoroti dampak industri tambak nikel diantaranya: *pertama*, karya Ardi, A. A, dkk (2024) menunjukkan bahwa keberadaan industri pertambangan dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku keagamaan, khususnya pada masyarakat mayoritas Islam di daerah pertambangan Morosi. Dampak pertambangan pada pola pikir dan perilaku beragama mencakup perubahan sikap terhadap perilaku keagamaan, namun agama tetap diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Ardi, A. A, dkk (2024) yang berfokus pada dampak kognitif dan ritualistik pertambangan terhadap pola pikir dan perilaku beragama masyarakat Morosi, peneliti dalam penelitian ini menggeser fokus pada konsekuensi yang lebih luas, yaitu melakukan studi etnografi untuk mengungkap dampak sosio-ekologis industri tambang di Kapoiala, yang mencakup perubahan relasi sosial dan kerusakan lingkungan beserta respon budaya masyarakat terhadapnya.

Kedua, penelitian yang baru ini dilakukan oleh Ashmarita, dkk (2025), membahas tentang kehidupan ekonomi masyarakat lokal di sekitar industri tambang Morosi. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa kehadiran industri tambang di Desa Morosi telah membawa perubahan signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat setempat. Banyak warga yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian kini beralih ke pekerjaan di industri tambang atau usaha lain seperti menjual makanan, buah-buahan, dan membangun rumah kost. Pergeseran ini menyebabkan aktivitas pertanian menurun drastis, sehingga ketersediaan lahan juga semakin berkurang. Selain itu, perubahan ini turut mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat dengan munculnya peluang usaha baru. Ashmarita, dkk (2025) telah mengidentifikasi perubahan mata pencaharian dan munculnya usaha-usaha baru sebagai dampak kehadiran industri tambang di Morosi dari perspektif ekonomi, penelitian ini berupaya melengkapi gambaran tersebut dengan pendekatan etnografi di Kapoiala. Fokus penelitian ini diarahkan pada konsekuensi sosio-ekologis yang lebih luas, yaitu bagaimana industri tambang tidak hanya mentransformasi struktur ekonomi, tetapi juga merombak tatanan sosial, pola hubungan antarwarga, serta kondisi lingkungan fisik yang menjadi basis kehidupan masyarakat Kapoiala secara turun-temurun.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Pratiwi, dkk (2024) membahas “Analisis Dampak Eksternalitas Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.” Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dampak eksternalitas dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang cukup meningkat dimana banyak masyarakat yang beralih profesi dari nelayan dan petani menjadi pekerja tambang. Selain itu peluang membuka usaha di sekitar wilayah pertambangan menjadi hal positif beberapa masyarakat membuka warung makan, warung sembako dan ada pula yang membangun rumah kos-kosan sehingga lapangan kerja yang lain juga semakin terbuka lebar. Akan tetapi, eksternalitas lainnya juga dapat merugikan warga akibat keberadaan aktivitas tambang. Penelitian ini akan menawarkan pendekatan yang berbeda secara fundamental, Pratiwi, dkk mengukur dampak dalam kerangka untung-rugi ekonomi, sementara melalui studi etnografi di Kapoiala, peneliti berupaya mengungkap konsekuensi sosio-ekologis secara holistik.

Keempat, penelitian Gunarto & Eliyanti (2024) juga membahas terkait “Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir.” Melalui pendekatan kepustakaan, studi ini mengkaji berbagai jurnal, artikel, dan laporan yang membahas dampak lingkungan dan sosial dari pencemaran logam berat. Hasil penelitian mereka menunjukkan pencemaran yang diakibatkan oleh limbah tambang nikel memiliki potensi besar untuk merusak ekosistem laut dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir. Limbah tambang nikel di pesisir Desa Tapuemea dan Desa Tapungaya, Molawe, Konawe Utara menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, serta menurunkan kualitas air dan kesehatan masyarakat pesisir. Jika Gunarto & Eliyanti memberikan gambaran umum tentang dampak pencemaran berdasarkan dokumentasi tertulis, maka penelitian ini berupaya menangkap realitas empiris dari pengalaman langsung masyarakat bagaimana polusi tidak hanya mengubah kondisi laut, tetapi juga merombak relasi sosial, mengganggu sistem mata pencaharian tradisional, dan membentuk kembali cara masyarakat memaknai hubungan mereka dengan lingkungan.

Kelima, penelitian Syarifuddin (2022) tentang “Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali,” ini juga melihat kondisi maritim Morowali di tengah meningkatnya aktivitas tambang nikel. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas tambang nikel telah menimbulkan dampak pada lingkungan maritim Morowali. Dampak nyata dari pembuangan limbah adalah sedimentasi pesisir Morowali. Hutan mangrove dan laut pesisir Morowali yang menjadi rumah bagi sumber daya perikanan rusak dan mengakibatkan nelayan mengalami penurunan pendapatan, sehingga nelayan kini harus melaut lebih jauh untuk mendapat ikan. Berbeda dengan penelitian Syarifuddin (2022) yang mengidentifikasi dampak nyata industri tambang terhadap lingkungan maritim Morowali, terutama sedimentasi pesisir dan kerusakan ekosistem mangrove beserta implikasinya terhadap pendapatan nelayan. Melalui pendekatan etnografi memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas pengalaman masyarakat Kapoiala yang tidak tereduksi oleh angka-angka statistik atau dokumentasi literatur semata bagaimana polusi, kerusakan ekosistem, transformasi mata pencaharian, dan perubahan relasi sosial saling terkait dalam jalinan pengalaman hidup yang utuh.

Keenam, penelitian Nuraeni (2018) juga mengkaji “Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat.” Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang positif dari segi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Morowali seiring dengan perkembangan industri pertambangan nikel, seperti kenaikan nilai IPM, menurunnya jumlah penduduk miskin dan peningkatan PDRB khususnya di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Perkembangan industri nikel juga membawa beberapa dampak negatif, diantaranya budaya hidup konsumtif, kurangnya motivasi untuk mengembangkan usaha, kecenderungan masyarakat ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah. Penelitian Nuraeni (2018) telah memberikan gambaran komprehensif tentang dampak industri tambang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Morowali dengan menggunakan indikator-indikator

pembangunan makro seperti IPM, PDRB, dan angka kemiskinan, serta observasi terhadap perubahan gaya hidup. Sementara penelitian ini menawarkan integrasi seluruh dimensi tersebut dalam bingkai sosio-ekologis melalui pendekatan etnografi.

Ketujuh, penelitian Galela, dkk (2023) menunjukkan kegiatan pertambangan PT.GNI di Desa Bunta memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Bunta. Dampak yang dialami oleh masyarakat Desa Bunta yaitu Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak sosial yang dirasakan masyarakat bahwasannya PT.GNI memberikan bantuan tenaga pendidik native speaker Bahasa asing untuk anak-anak SD dan SMP Desa Bunta dan menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan maupun Kesehatan bagi masyarakat berupa bantuan alat Komputer dan Obat-obatan. Dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, terbukanya peluang usaha mikro, dan membantu masyarakat untuk memanfaatkan UMKM dengan bantuan Bumdes. Dampak lingkungan yang dirasakan yaitu mempengaruhi polusi udara dan mengganggu aktivitas masyarakat bahkan dapat mengganggu pernapasan masyarakat akibat debu dari aktivitas tambang PT.GNI. Penelitian ini tidak sekadar mencatat bantuan yang diberikan perusahaan atau polusi yang ditimbulkan sebagaimana didokumentasikan Galela, dkk, tetapi berusaha memahami bagaimana masyarakat Kapoiala secara langsung mengalami, merespons, dan memaknai transformasi ruang hidup mereka dalam jalinan pengalaman yang utuh.

Konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang bukanlah fenomena baru dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan. Sejak era Orde Baru, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menempatkan sektor ekstraktif sebagai salah satu pilar utama, seringkali dengan mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Kasus Freeport di Papua, yang telah beroperasi sejak tahun 1967, menjadi prototipe awal dari relasi kuasa yang timpang antara korporasi asing, negara, dan masyarakat adat. Ribuan warga Amungme dan Kamoro kehilangan tanah ulayat mereka, sungai-sungai tercemar limbah tailing, dan konflik berkepanjangan telah merenggut banyak korban jiwa (Leith, 2002; Ballard, 2001).

Memasuki era Reformasi dan desentralisasi, pola konflik ini tidak serta-merta membaik. Justru, dengan melimpahnya kewenangan ke daerah, konflik agraria dan pertambangan semakin marak terjadi. Kasus PT Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara (1996-2004) menunjukkan bagaimana perusahaan tambang emas dapat beroperasi dengan AMDAL yang lemah, menyebabkan pencemaran teluk Buyat yang berdampak pada kesehatan nelayan dan kerusakan ekosistem laut. Kasus PT Inco (sekarang PT Vale) di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang telah beroperasi sejak 1978, juga menunjukkan pola serupa dimana masyarakat lokal kehilangan akses terhadap hutan dan sungai, sementara perusahaan menuai keuntungan besar dari eksploitasi nikel (Robinson, 2012).

Di Sulawesi Tenggara sendiri, konflik pertambangan memiliki sejarah panjang. Sebelum PT VDNI dan PT OSS hadir di Konawe, wilayah ini telah menjadi lokasi tambang nikel skala kecil yang dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) sejak tahun 1970-an di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Meskipun berskala lebih kecil, operasi

Antam di Pomalaa telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius, termasuk pencemaran sungai dan kerusakan terumbu karang di pesisir. Namun, skala konflik dan dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di Kapoiala pasca-2015, karena keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi Antam pada masa itu.

Dalam hal ini apa yang membedakan kasus Kapoiala dari kasus-kasus sebelumnya adalah beberapa faktor kunci. *Pertama*, kecepatan transformasi spasial yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari satu dekade (2015-2026), wilayah agraris dan pesisir Kapoiala berubah menjadi kawasan industri terintegrasi yang mencakup smelter, PLTU captive, jetty, dan jalan hauling. Proses perubahan yang begitu cepat ini tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi atau bagi negara untuk melakukan pengawasan yang memadai. *Kedua*, keterlibatan modal asing, khususnya dari Tiongkok, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sulawesi Tenggara. PT VDNI dan PT OSS adalah bagian dari gelombang besar investasi Tiongkok di sektor nikel Indonesia pasca-larangan ekspor bijih mentah, yang didorong oleh kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan kebutuhan Tiongkok akan pasokan nikel untuk industri baterai kendaraan listriknya (ICEL, 2022).

Ketiga, kasus Kapoiala juga unik karena lokasinya yang berada di pesisir dan muara sungai, sehingga dampak ekologisnya tidak hanya dirasakan di darat tetapi juga di laut. Abrasi yang melanda Desa Muara Sampara, yang telah menenggelamkan puluhan rumah warga, adalah contoh dramatis dari bagaimana perubahan hidrologis yang disebabkan oleh tambang dapat memicu bencana ekologis yang berulang. Pola ini jarang ditemukan di kasus-kasus tambang sebelumnya yang umumnya berlokasi di pedalaman atau pegunungan. *Keempat*, Kapoiala juga menunjukkan pola resistensi masyarakat yang lebih beragam dan terorganisir, termasuk gugatan hukum, aksi demonstrasi, dan kampanye media, yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi dan dukungan dari jaringan advokasi nasional dan internasional.

Kapoiala tersorot bukan hanya didasarkan pada kedekatannya dengan pusat industri tambang PT VDNI dan PT OSS, tetapi juga karena wilayah ini merepresentasikan kompleksitas dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan oleh hadirnya pembangunan industri ekstraktif. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada lahan pertanian harus menghadapi realitas kehilangan tanah produktif akibat pembangunan area produksi industri pertambangan. Keadaan ini menunjukkan dinamika sosial dan lingkungan, sebagian warga harus beradaptasi dengan lapangan kerja baru di sektor tambang, karena meninggalkan mata pencaharian lama atau masih tradisional. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya konflik antar masyarakat lokal, Perusahaan dengan negara karena adanya tekanan ekologis yang semakin berat dirasakan seperti polusi udara dan sungai tercemar akibat limbah dari tambang.

Kehadiran industri tambang di Kecamatan Kapoiala menunjukan sebuah fakta krisis lingkungan, keberadaannya tidak hanya memberi dampak polusi seperti debu dan asap, tetapi juga menciptakan kondisi ekonomi Masyarakat lokal menurun akibat pencemaran air. Dalam hal ini, aktivitas pertambangan dan pengoperasian

PLTU di Kawasan industri tersebut telah mengubah kualitas lingkungan secara signifikan. Rumah tangga dengan hanya bertumpu pada penghidupan sektor pertanian, kini merasa dirugikan karena lahan produktifnya tercemar oleh limbah industri. Akibatnya, beberapa lahan pertanian mengalami penurunan produktivitas, bahkan sebagian tidak lagi dapat menggarap lahannya karena modal yang dikeluarkan lebih besar dari pada produksi yang dihasilkan.

Selain itu, nelayan tradisional yang bergantung pada hasil laut juga merasakan dampak serupa akibat turunnya populasi ikan di perairan sekitar, yang diduga disebabkan oleh pembuangan limbah industri ke laut. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan Masyarakat, juga memunculkan konflik sosial antara warga dan pihak Perusahaan terkait hak atas lingkungan hidup. Realitas tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi industri dan keberlanjutan lingkungan hidup Masyarakat setempat.

Dalam perspektif antropologi klasik Indonesia, ini berkaitan dengan pendapat Koentjaraningrat (2009) yang menegaskan bahwa masyarakat lokal merupakan kumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah, dengan kesatuan hidup saling berinteraksi berdasarkan sistem adat-istiadat di wilayah tertentu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Identitas itu terbentuk melalui proses panjang adaptasi terhadap lingkungan alam sekitarnya. Bagi masyarakat agraris dan pesisir seperti di Kapoiala, hubungan dengan tanah, sungai, dan laut bukan hanya relasi ekonomi, tetapi juga relasi kultural yang diwariskan lintas generasi. Seperti budaya merasai dalam istilah lokal Tolaki diartikan kerja sama, budaya ini termasuk sistem adat-istiadat yang biasa ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Ketika industri tambang hadir dan merombak lanskap secara drastis, yang dirasakan masyarakat lokal bukan hanya perubahan mata pencaharian, melainkan dislokasi kultural yaitu tergesernya praktik budaya, nilai-nilai leluhur, dan sumber daya yang selama ini menjadi penopang identitas kolektif mereka. Dengan kata lain, masuknya nilai-nilai baru yang lebih dominan dalam Pembangunan industri tambang menciptakan krisis ekologis di Kapoiala sekaligus menjadi penyebab adanya krisis sistem budaya lokal sebagaimana yang dikutip dalam Koentjaraningrat (2009).

Melihat fenomena ketimpangan yang terjadi di Kapoiala, ini bukanlah kasus yang terisolasi, melainkan representasi dari pola relasi kuasa yang lebih besar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia pasca-otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014), kewenangan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan, sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini awalnya dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya, desentralisasi justru mempercepat eksploitasi sumber daya alam karena pemerintah daerah, yang tengah dibebani target fiskal, cenderung memberikan kemudahan perizinan kepada investor tanpa diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai (Aspinall & van Klinken, 2011).

Di Sulawesi Tenggara, euforia investasi pasca-desentralisasi telah mengubah peta ekonomi regional secara fundamental. Kabupaten Konawe, yang

sebelumnya mengandalkan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi, kini bergantung pada royalti dan pajak dari industri tambang nikel. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD Kabupaten Konawe melonjak dari kurang dari 5% pada tahun 2010 menjadi lebih dari 40% pada tahun 2020 (Kemenkeu, 2021). Ketergantungan fiskal ini menciptakan apa yang disebut para akademisi sebagai *resource curse* atau *paradoks kelimpahan*, di mana daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang timpang, korupsi yang meluas, dan konflik sosial yang berkepanjangan (Rosser, 2007; Watts, 2004).

Dalam konteks Kapoiala, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan dari sektor tambang telah menciptakan konflik kepentingan yang serius. Di satu sisi, pemerintah daerah berkewajiban melindungi warganya dari dampak kerusakan lingkungan. Di sisi lain, tindakan tegas terhadap perusahaan tambang berisiko mengganggu investasi dan mengurangi PAD. Kondisi ini menyebabkan aparat pengawas lingkungan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, cenderung bersikap lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT VDNI dan PT OSS. Hasil penelitian Walhi Sultra (2024) mengungkapkan bahwa sejak beroperasi pada tahun 2015, kedua perusahaan tersebut belum pernah dikenakan sanksi administratif yang berarti, meskipun puluhan laporan warga tentang pencemaran air dan udara telah dilayangkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.

Ketimpangan akses terhadap informasi dan partisipasi publik menjadi faktor kunci yang memperparah ketidakadilan sosio-ekologis di Kapoiala. Proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh PT VDNI dan PT OSS sebelum memulai operasinya, misalnya, dinilai oleh banyak pihak tidak melibatkan masyarakat lokal secara substantif. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, sejumlah warga Kapoiala mengaku tidak pernah diundang dalam forum-forum sosialisasi AMDAL. Adapun yang diundang, dokumen yang disajikan terlalu teknis untuk dipahami oleh masyarakat awam. Praktik ini mencerminkan apa yang disebut dalam literatur ekologi politik sebagai *participatory exclusion*, yaitu proses di mana mekanisme partisipasi formal justru digunakan untuk meligitimasi keputusan yang sudah diambil oleh aktor-aktor dominan, alih-alih memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan (Bryant & Bailey, 1997; Li, 2015).

Kehadiran PT VDNI dan PT OSS di Kapoiala juga harus dipahami dalam kerangka geopolitik regional yang lebih luas, khususnya terkait dengan strategi hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2020). Kebijakan hilirisasi, yang bertujuan untuk menghentikan ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter di dalam negeri, memang berhasil meningkatkan nilai tambah komoditas nikel secara dramatis. Namun, kebijakan ini juga memicu percepatan eksploitasi sumber daya alam tanpa perencanaan tata ruang yang matang. Smelter-smelter besar seperti yang dimiliki PT VDNI dan PT OSS dibangun dalam waktu yang

sangat singkat seringkali hanya 2-3 tahun tanpa didahului oleh kajian lingkungan yang komprehensif dan partisipatif (ICEL, 2022).

Implikasi dari kebijakan hilirisasi yang tiba-tiba dan masif ini terhadap masyarakat lokal sangatlah signifikan. Lonjakan permintaan bijih nikel pasca-larangan ekspor menyebabkan perusahaan tambang berupaya memperluas area konsesi mereka secepat mungkin, seringkali dengan mengabaikan batas-batas tanah adat dan wilayah kelola masyarakat. Di Kapoiala, perluasan area tambang PT VDNI dan PT OSS telah merambah ke kawasan hutan lindung dan sempadan sungai, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Praktik perambahan kawasan lindung ini tidak hanya merusak fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawehea, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan perikanan.

Selain itu, kebijakan hilirisasi telah mengubah struktur pasar tenaga kerja lokal secara fundamental. Pembangunan smelter dan infrastruktur pendukungnya seperti PLTU dan jalan hauling membutuhkan ribuan tenaga kerja, baik yang terampil maupun tidak terampil. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya di wilayah pertambangan (Ballard & Banks, 2003; Kirsch, 2014), masuknya tenaga kerja dari luar daerah seringkali menimbulkan gesekan sosial dan ekonomi dengan masyarakat lokal. Di Kapoiala, warga mengeluhkan bahwa sebagian besar posisi yang menjanjikan di perusahaan tambang diisi oleh pekerja dari luar Sulawesi Tenggara atau bahkan dari luar negeri (Tiongkok), sementara warga lokal hanya mendapat pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan upah minim dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai *enclave economy*, di mana perusahaan tambang beroperasi seperti "negara dalam negara" yang terisolasi dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya (Ferguson, 2005).

Praktik pengambilalihan tanah masyarakat di Kapoiala oleh PT VDNI dan PT OSS juga menunjukkan adanya *legal pluralism* yang timpang, di mana hukum negara (seperti UU Pokok Agraria dan peraturan perizinan tambang) lebih berpihak pada kepentingan korporasi, sementara hak-hak adat dan klaim tradisional masyarakat atas tanah dan sumber daya alam diabaikan atau tidak diakui. Sebagaimana diungkapkan dalam studi-studi tentang agraria di Indonesia (Peluso, 1992; Li, 2015), negara seringkali menggunakan instrumen hukum seperti sertifikat hak milik (SHM) dan izin lokasi untuk melakukan *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan), yaitu proses di mana modal mengakumulasi dirinya bukan hanya melalui eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga melalui perampasan aset-aset publik dan komunal, termasuk tanah, air, dan hutan.

Proses *dispossession* yang terjadi di Kapoiala tidak selalu berbentuk kekerasan fisik terbuka, melainkan lebih sering melalui mekanisme yang halus dan birokratis. Sebagaimana diceritakan oleh warga dalam wawancara, perusahaan tambang awalnya mendekati warga dengan janji-janji kompensasi yang menggiurkan, lapangan kerja, dan bantuan infrastruktur. Namun, setelah tanah berpindah tangan, janji-janji tersebut seringkali tidak dipenuhi atau dipenuhi hanya sebagian. Warga yang menolak menjual tanahnya kemudian menghadapi tekanan

psikologis dan ekonomi, seperti akses jalan yang ditutup, sawah dan tambak yang tercemar, atau bahkan intimidasi oleh aparat keamanan yang dikerahkan perusahaan. Inilah yang oleh para akademisi disebut sebagai *graduated violence* atau kekerasan bertahap, yaitu praktik intimidasi yang tidak cukup ekstrem untuk disebut sebagai pelanggaran HAM berat, namun cukup efektif untuk memaksa warga tunduk pada kepentingan korporasi (Peluso & Lund, 2011).

Secara metodologis, pendekatan etnografi yang dipilih dalam penelitian ini sangat relevan untuk mengungkap kompleksitas dampak sosio-ekologis industri tambang di Kapoiala. Berbeda dengan survei kuantitatif yang hanya mampu menangkap data agregat, etnografi memungkinkan peneliti untuk menyelami pengalaman hidup (*lived experience*) masyarakat secara mendalam, memahami bagaimana mereka memaknai perubahan yang terjadi, dan mengamati praktik-praktik adaptasi, negosiasi, maupun resistensi yang mereka lakukan sehari-hari. Etnografi kritis, khususnya, tidak hanya bertujuan mendeskripsikan realitas, tetapi juga membongkar struktur kekuasaan yang melatarbelakangi ketidakadilan dan memberdayakan suara-suara yang terpinggirkan (Madison, 2005).

Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya bagi pengembangan ilmu antropologi dan ekologi politik, tetapi juga pada manfaat praktisnya bagi advokasi kebijakan. Dengan menyediakan data empiris yang kaya tentang konsekuensi nyata dari industri tambang bagi masyarakat lokal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Temuan-temuan penelitian dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi perlunya reformasi tata kelola pertambangan, termasuk penguatan sistem AMDAL, penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan adat atas tanah dan sumber daya alam.

Penelitian ini juga memberikan sumbangan penting bagi pengembangan pendekatan ekologi politik di Indonesia. Meskipun ekologi politik telah menjadi kerangka analisis yang populer dalam kajian lingkungan global, penerapannya pada konteks lokal Indonesia, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang kaya sumber daya tetapi miskin infrastruktur penelitian, masih tergolong terbatas. Dengan memfokuskan pada Kapoiala, sebuah wilayah yang relatif belum banyak tersentuh penelitian akademis, penelitian ini akan memperkaya studi ekologi politik dengan kasus baru yang memiliki kekhasan tersendiri, baik dari segi aktor yang terlibat (perusahaan Cina, pemerintah daerah, masyarakat adat Tolaki), komoditas yang dieksploitasi (nikel), maupun dinamika sosial-politik lokal yang melingkupinya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan empiris tentang dampak tambang di Kapoiala, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori dan metodologi dalam kajian antropologi lingkungan dan ekologi politik. Ia berada di persimpangan antara riset akademis yang ketat dan advokasi sosial yang berkomitmen, antara deskripsi budaya yang mendalam dan kritik struktural yang tajam. Inilah yang menjadi nilai tambah utama dari penelitian etnografi ini, sekaligus yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung lebih sempit fokusnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, penting untuk merumuskan masalah penelitian secara lebih terarah guna menggali bagaimana masyarakat lokal mengalami dan merespon dampak industrialisasi tambang. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini menjadi dasar untuk memastikan penelitian tetap terarah dan sesuai dengan topik yang dibahas. Berikut masalah yang telah dirumuskan dan menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana persepsi masyarakat lokal tentang keberadaan industri tambang nikel di Kapoiala Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana dampak sosio-ekologis yang dirasakan Masyarakat Lokal akibat aktivitas industri tambang nikel di Kapoiala Kabupaten Konawe?
3. Bagaimana bentuk ketidakadilan sosio-ekologis dalam dinamika kekuasaan, akses dan ketimpangan dari pembangunan industri tambang nikel di Kapoiala Kabupaten Konawe?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan memecahkan masalah yang memerlukan solusi. Seperti halnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengintervensi adanya suatu kondisi atau proses dampak industri tambang yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis persepsi masyarakat lokal tentang keberadaan industri tambang nikel di Kapoiala Kabupaten Konawe.
2. Menganalisis dampak sosio-ekologis yang dirasakan masyarakat lokal akibat aktivitas industri tambang nikel di Kapoiala Kabupaten Konawe.
3. Mengkaji bentuk ketidakadilan sosio-ekologis dalam dinamika kekuasaan, akses dan ketimpangan dari pembangunan industri tambang nikel di Kapoiala Kabupaten Konawe.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki nilai yang strategis, baik dalam pengembangan teori maupun dalam penerapannya di ranah kebijakan dan praktik lapangan. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat diukur dalam dua dimensi, yakni manfaat akademik dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai dampak industri pertambangan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi daerah dan keberlanjutan sosial-ekonomi serta lingkungan. Secara teoritis, kajian ini memperluas wawasan melalui penerapan perspektif ekologi politik yang menyoroti hubungan kekuasaan dalam mengatur struktur yang berkaitan dengan proses pembangunan pertambangan. Pendekatan ini juga membantu mengungkap bagaimana kebijakan pembangunan yang berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan dimensi keadilan sosial dan lingkungan, sehingga menciptakan ketimpangan struktural.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual memahami lebih dalam mengenai masyarakat lokal dengan hubungannya terhadap lingkungan. Dalam hal ini, mencakup kehidupan masyarakat dalam menghadapi tekanan eksternal dengan aktor dominan. Dalam ranah metodologis, penelitian ini memperkaya literatur dengan menggabungkan data etnografi lapangan yang mendokumentasikan pengalaman hidup masyarakat terdampak, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang konsekuensi sosial-ekologis dari aktivitas pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan menyediakan data empiris yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar dalam memahami dampak dari aktivitas industri tambang bagi masyarakat lokal. Dengan ini, temuan dapat memperkuat evaluasi implementasi dalam perumusan kebijakan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat lokal. Demikian pula, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi perusahaan pertambangan dalam merancang program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pemulihan lahan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan, serta penciptaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini memberikan ruang refleksi bagi organisasi masyarakat dan komunitas lokal dalam memperkuat kapasitas advokasi mereka terhadap kebijakan dan praktik pertambangan yang eksploitatif. Temuan empiris yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menuntut keterlibatan yang lebih besar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang hidup mereka. Dengan ini, penelitian tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga alat advokasi yang mendorong transformasi sosial menuju tata kelola sumber daya yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

1.5 DESAIN KONSEPTUAL

1. Konsep Pertambangan

Pertambangan adalah proses yang fundamental dalam memperoleh mineral, logam, batubara, dan bahan tambang lainnya dari deposit yang terletak di bawah permukaan bumi. Definisi ini mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi eksplorasi, penggalan, dan pengolahan bahan tambang. Industri tambang adalah sektor yang melibatkan ekstraksi sumber daya alam (terutama mineral dan energi) dari bumi untuk kepentingan ekonomi. Sumber daya yang umum ditambang, ini mencakup logam seperti emas, tembaga, batubara, nikel, dan mineral lainnya. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Zulkarnain, 2023).

Dalam pandangan antropologi, pertambangan tidak hanya dipahami sebagai proses ekonomi dan teknis untuk mengekstraksi sumber daya alam, tetapi juga sebagai fenomena sosial budaya yang merefleksikan hubungan kompleks antara manusia, lingkungan, dan sistem produksi. Pertambangan merupakan wujud nyata dari cara manusia beradaptasi terhadap kondisi ekologis dan ekonomi yang terus berubah, sekaligus menggambarkan bagaimana masyarakat memaknai dan mengelola sumber daya alam dalam konteks budaya mereka (Taussig, 1980). Dengan demikian, kegiatan pertambangan menjadi bagian dari dinamika sosial yang memperlihatkan interaksi antara nilai-nilai ekonomi, simbolik, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif antropologi lingkungan, pertambangan juga dipandang sebagai aktivitas yang memiliki konsekuensi sosial dan budaya yang mendalam. Proses eksploitasi mineral dan logam dari dalam bumi seringkali memicu perubahan dalam struktur sosial, pola mata pencaharian, serta sistem kepercayaan masyarakat setempat (Kirsch, 2014). Kegiatan pertambangan dapat menghadirkan peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap tatanan sosial, seperti munculnya kesenjangan ekonomi, perubahan nilai-nilai budaya, dan ketegangan sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang maupun pemerintah. Oleh karena itu, para antropolog menilai bahwa memahami pertambangan tidak cukup hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, sejarah, dan budaya masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Tujuan pertambangan dalam pandangan antropologi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, melainkan juga mencakup upaya memahami bagaimana manusia bernegosiasi dengan alam dan teknologi dalam kerangka kehidupan sosialnya. Pertambangan dapat menjadi sarana untuk menelusuri relasi antara manusia dan lingkungan, serta mengungkap bagaimana aktivitas ekonomi modern berdampak pada kelestarian budaya lokal dan ekosistem (Bebbington, dkk, 2008). Dalam konteks ini, praktik pertambangan berkelanjutan bukan hanya berarti menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga menghormati nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Dalam studi etnografi di wilayah Kapoiala, melihat pertambangan membawa dampak ganda yaitu di satu sisi menciptakan peluang ekonomi baru, dan di sisi lain menimbulkan tekanan sosial dan perubahan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini seperti Kirsch (2014) dalam kajiannya tentang *mining capitalism* menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal kerap diwarnai ketegangan, terutama ketika mekanisme kompensasi dan pelibatan masyarakat tidak berjalan secara adil. Pengalaman Masyarakat di Kapoiala, membawa kita untuk memahami bagaimana sebagian masyarakat merasa diuntungkan oleh peluang kerja di sektor tambang, sementara sebagian

lainnya mengalami marginalisasi akibat menurunnya akses terhadap lahan dan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi basis ekonomi tradisional mereka.

Selain itu, pandangan Taussig (1980) tentang “fetisisme komoditas” juga relevan dalam menjelaskan perubahan persepsi masyarakat Kapoiala terhadap sumber daya alam. Sumber daya tambang yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari alam yang memiliki nilai spiritual dan sosial, kini dipandang terutama sebagai komoditas ekonomi. Pergeseran makna ini menunjukkan bagaimana ekonomi kapitalistik mempengaruhi tatanan nilai dan hubungan sosial masyarakat lokal.

Dari perspektif antropologi lingkungan, pertambangan di Kapoiala juga menimbulkan perubahan pada pola interaksi masyarakat dengan alam. Dengan adanya aktivitas eksploitasi tambang menyebabkan degradasi lingkungan seperti pencemaran air, berkurangnya area pertanian, dan perubahan bentang alam. Hal ini sejalan dengan pandangan Bebbington, dkk, (2008), menekankan pertambangan sebagai pembangunan berbasis sumber daya alam yang cenderung menimbulkan ambiguitas, di mana kemajuan ekonomi justru dapat disertai kemunduran sosial dan ekologis.

Dengan demikian, kehadiran industri tambang di wilayah ini bukan hanya persoalan ekonomi semata, melainkan juga merupakan fenomena budaya yang kompleks, melibatkan negosiasi nilai, perubahan identitas sosial, serta transformasi hubungan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan antropologis melalui etnografi memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana masyarakat lokal memahami, menyesuaikan diri, atau bahkan menolak perubahan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan pertambangan juga memiliki skala yang besar. Di satu sisi, sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, serta pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, efek negatifnya tidak dapat diabaikan. Pertambangan kerap memicu perubahan dalam struktur sosial masyarakat, termasuk perpindahan penduduk yang dapat menambah beban pada layanan publik dan mengubah dinamika sosial di tingkat lokal (Franks, dkk, 2022). Dalam hal ini, dipahami ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi seringkali menimbulkan ketegangan sosial. Masyarakat yang tidak memperoleh keuntungan sebanding dari proyek pertambangan, atau yang justru terdampak oleh kerusakan lingkungan, sangat merasa dirugikan dan hal ini dapat memicu munculnya konflik sosial.

2. Konsep Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal seringkali dilihat sebagai entitas yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan alam dan budaya yang mereka miliki. Masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka, seperti pertanian atau perikanan, biasanya mengalami perubahan dalam struktur sosial mereka setelah industri tambang memasuki wilayah tersebut. Perubahan ini seringkali mencakup pergeseran peran sosial,

seperti munculnya ketimpangan ekonomi antara mereka yang terlibat dalam industri tambang dan mereka yang tetap mempertahankan mata pencaharian tradisional.

Hal ini sejalan dengan Sardjono (2004) yang mendefinisikan masyarakat lokal adalah sekelompok orang, baik yang disebut masyarakat adat maupun pendatang (sedaerah ataupun dari luar daerah) yang telah turun temurun tinggal di dalam dan sekitar hutan, sehingga memiliki keterikatan kehidupan (teknologi dan norma budaya) serta penghidupan bersama atas hasil hutan dan lahan hutan. Dalam hal ini penghidupan mereka meliputi subsisten dan pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya alam.

Menurut Koentjaraningrat (2009), Masyarakat lokal kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu dan memiliki rasa identitas bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya sekadar kelompok yang tinggal dalam suatu wilayah geografis yang sama, tetapi juga memiliki ikatan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Identitas tersebut tercermin melalui pola kehidupan, sistem kepercayaan, serta praktik sosial yang menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya.

Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal yang mereka miliki seringkali menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketika suatu wilayah mengalami perubahan besar akibat industrialisasi atau eksploitasi sumber daya, masyarakat lokal menjadi pihak yang paling terdampak karena perubahan tersebut tidak hanya menggeser struktur ekonomi mereka, tetapi juga mengancam kelangsungan nilai-nilai budaya dan sosial yang telah lama terbentuk. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep masyarakat lokal menjadi penting untuk melihat bagaimana hubungan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan saling mempengaruhi dalam proses pembangunan pertambangan di wilayah Kapoiala

Menurut Chester dan Paul (1993) masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut. Sejalan dengan pandangan para ahli antropologi, masyarakat lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup dalam wilayah tertentu secara turun-temurun, memiliki sistem nilai dan adat yang membentuk identitas bersama, serta melakukan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan dalam kerangka kehidupan kolektif.

Pandangan Bodley (1982) menekankan bahwa masyarakat lokal menjadi pihak yang termarginalkan akibat modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam, menyebabkan tanah adat mereka tergeser dan kearifan lokal mulai terkikis. Dalam konteks ini, masyarakat lokal dapat diartikan sangat terikat dengan alam melalui praktik pertanian, berburu, atau pengelolaan hutan, seringkali menghadapi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas

tambang. Selain dapat mengancam sumber daya alam yang mereka andalkan, juga merusak pengetahuan dan kearifan lokal yang telah mereka pelihara. Selain itu, masyarakat lokal dalam hal ini dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang memiliki keterikatan historis, budaya, dan ekologis terhadap wilayah tertentu. Mereka hidup dalam keterhubungan yang erat dengan lingkungan alam sekitarnya, menggunakan sumber daya secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional. Masyarakat lokal adalah mereka yang mengandalkan mata pencaharian dari sumber daya alam setempat, seperti pertanian, perikanan, atau kehutanan, yang mereka kelola dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis.

3. Konsep Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana terjadi perbedaan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesejahteraan di antara kelompok masyarakat (Soetomo, 2009). Dalam konteks industri tambang, ketimpangan ini tampak dari perbedaan manfaat ekonomi yang diterima antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. Aktivitas pertambangan yang berorientasi pada kapitalisme global cenderung menempatkan masyarakat lokal hanya sebagai penerima dampak, bukan penerima manfaat utama (Harvey, 2005).

Menurut Bourdieu (1986), ketimpangan sosial dapat terjadi karena distribusi yang tidak merata terhadap *modal ekonomi, sosial, dan kultural*. Dalam kasus Kecamatan Kapoiala, masyarakat lokal memiliki keterbatasan modal ekonomi dan pendidikan untuk terlibat langsung dalam aktivitas industri tambang berskala besar. Sebaliknya, pihak perusahaan dan pekerja dari luar daerah memiliki akses yang lebih besar terhadap lapangan kerja dan keuntungan finansial. Situasi ini menciptakan struktur sosial baru yang hierarkis, di mana masyarakat lokal berada pada posisi subordinat.

ketimpangan sosial juga tercermin dalam perubahan struktur mata pencaharian. Sebagian masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan kini kehilangan sumber penghidupan akibat kerusakan lingkungan dan terbatasnya lahan produktif. Hal ini seperti, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu beradaptasi dengan bekerja di sektor industri, meskipun dalam posisi kerja tidak tetap dan bergaji rendah. Kondisi tersebut memperparah kesenjangan ekonomi dan memperlemah kemandirian masyarakat lokal (Tjiptoherijanto, 2012).

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ketimpangan sosial yang muncul akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Kapoiala bukan sekadar akibat dari distribusi ekonomi yang tidak merata, tetapi juga merupakan konsekuensi dari ketimpangan kekuasaan dan pengabaian terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa konsekuensi sosial-ekologis industri tambang harus dipahami secara menyeluruh tidak hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

4. Ekologi Politik (Political Ecology)

Politik lingkungan merupakan politik yang melingkupi pengelolaan sumber daya alam. Michael Watts (2000) mengemukakan bahwa politik lingkungan (Ecology Politic) adalah sebuah studi yang digunakan untuk memahami hubungan antara masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui analisis kondisi sosial dalam bentuk yang dinamis (akses dan kontrol) terhadap sumber daya alam serta implikasinya terhadap kelestarian lingkungan yang nantinya untuk keberlanjutan kehidupan.

Ekologi politik (political ecology) berangkat dari pemikiran bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah ekologis atau teknis, tetapi juga sebagai hasil dari relasi kekuasaan, kebijakan ekonomi, dan struktur sosial yang melingkupinya. Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa ekologi politik menggabungkan analisis ekologis dengan dimensi politik dan ekonomi, untuk memahami bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya alam dan siapa yang menanggung bebannya.

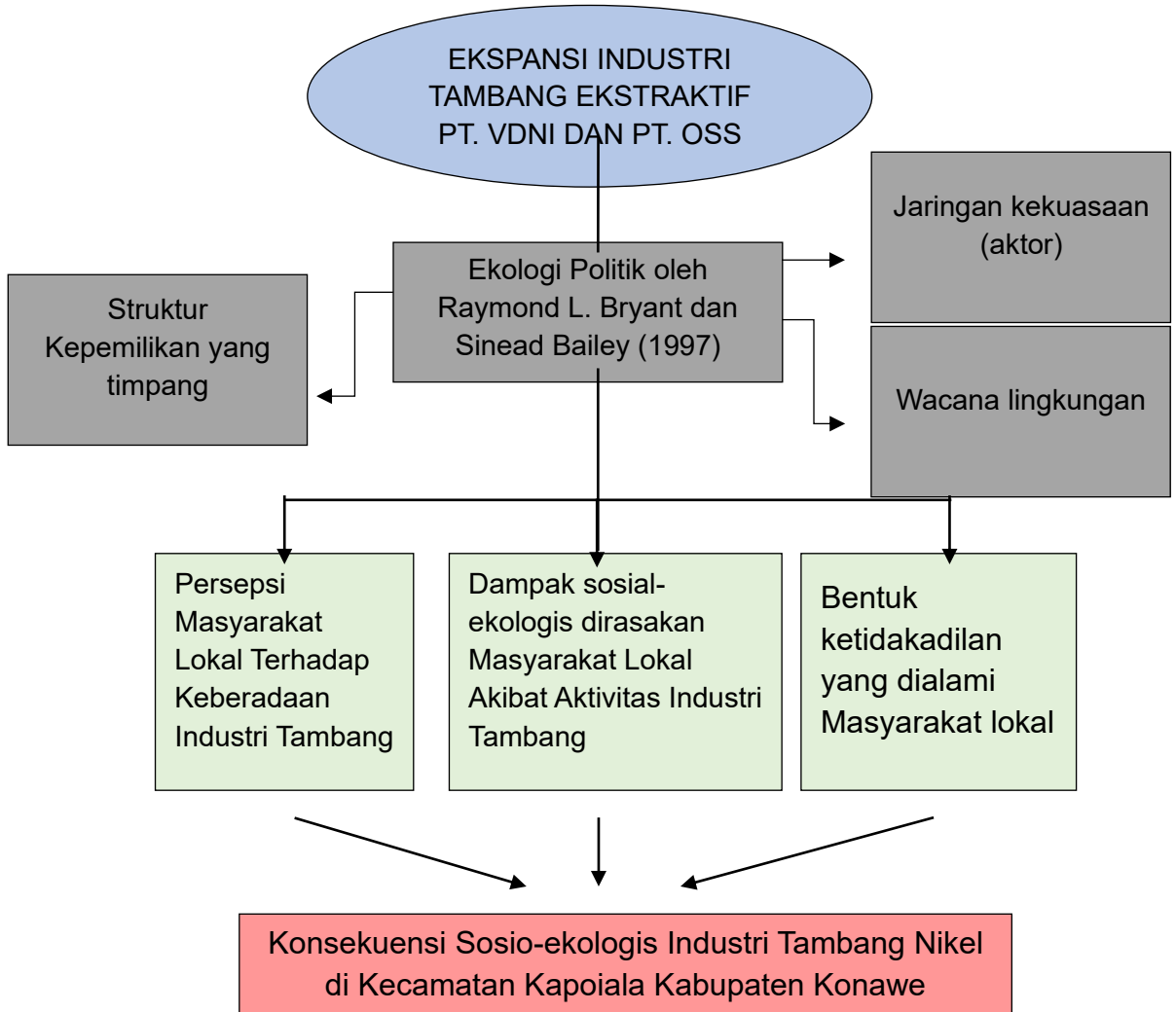
Dalam konteks industri tambang di Kecamatan Kapoiala, pendekatan ekologi politik relevan digunakan untuk mengkaji bagaimana keputusan politik dan ekonomi membentuk pola akses, kontrol, serta distribusi manfaat dan beban lingkungan, sehingga menampilkan hubungan kekuasaan yang menentukan siapa diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana praktik pemanfaatan sumber daya alam berdampak pada kelangsungan ekologi dan keberlangsungan sosial masyarakat lokal. Keberadaan industri tambang perusahaan besar seperti PT Virtue Dragon Nickel Industri dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) memperlihatkan adanya struktur kekuasaan yang timpang, di mana kepentingan ekonomi nasional dan investor lebih diutamakan dibandingkan hak-hak ekologis masyarakat lokal.

Ekologi politik menekankan bahwa degradasi lingkungan bukanlah akibat semata dari kesalahan teknis atau kurangnya kesadaran lingkungan, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari praktik ekonomi-politik yang tidak adil (Peet & Watts, 2004). Dalam pendekatan ini, perusakan lingkungan di Kecamatan Kapoiala dipahami tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang melekat dalam sistem perizinan, investasi, dan kebijakan energi nasional. Dampak sosial-ekologis seperti pencemaran air, menurunnya kualitas udara, serta hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat adalah hasil dari keputusan politik yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penerapan perspektif ekologi politik dalam penelitian ini membantu memahami bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat Kapoiala bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan ketidakadilan struktural. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal bukan sekadar sebagai korban pasif, melainkan sebagai aktor yang berhadapan dengan sistem kekuasaan yang menentukan nasib ruang hidup mereka. Analisis ekologi politik dengan demikian membuka ruang bagi kritik kebijakan pembangunan yang

eksploitatif, serta mendorong pentingnya keadilan ekologis bagi masyarakat lokal.

KERANGKA BERPIKIR



Bagan Kerangka Pikir

Keterangan:

- = pengalaman Masyarakat lokal tentang industri tambang
- = masalah utama yang diteliti
- = Pendekatan/alat analisis yang digunakan
- = Output data lapangan dan analisis penelitian

Berdasarkan bagan di atas, dapat dipahami kerangka berpikir penelitian ini melihat tiga permasalahan, yakni *Pertama*, persepsi masyarakat lokal terhadap keberadaan industri tambang, sebagai fokus utama untuk menyoroti bagaimana mereka memaknai hadirnya industri tambang agar dapat memahami perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi yang terjadi. *Kedua*, dampak sosial-ekologis yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas industri tambang, dalam hal ini untuk menganalisis bagaimana perubahan pada lingkungan fisik (lahan, air, udara), sumber penghidupan, kesehatan, serta relasi sosial-ekonomi memengaruhi kehidupan masyarakat lokal, dalam hal ini aktivitas tambang ekstraktif. *Ketiga*, bentuk ketidakadilan yang dialami Masyarakat lokal, yang memfokuskan pada ketimpangan sosial untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kehidupan Masyarakat lokal didominasi oleh kepentingan kapitalisme dalam konteks keberadaan industri tambang di wilayah Kapoiala. Output penelitian ini menghasilkan studi etnografi yang membahas konsekuensi sosial-ekologis yang ditimbulkan dari kehadiran industri tambang di Kapoiala dengan pendekatan ekologi politik sebagai alat analitis kritis kita bisa melihat

Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik sebagai alat analisis kritis, penelitian ini dapat melihat bahwa permasalahan yang muncul tidak semata-mata berupa dampak teknis lingkungan, melainkan berkaitan erat dengan hubungan kekuasaan, distribusi sumber daya, serta kepentingan ekonomi-politik yang melingkupinya. Melalui kerangka ini, perubahan lingkungan seperti degradasi lahan, polusi udara dan udara diwujudkan sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan aktor-aktor kuat negara dan korporasi yang memiliki akses dan kontrol lebih besar terhadap sumber daya alam masyarakat dibandingkan lokal.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini juga memungkinkan untuk mengungkap bagaimana ketimpangan akses dan kekuasaan tersebut memproduksi bentuk-bentuk ketidakadilan sosial, seperti perampasan lahan, marginalisasi mata pencaharian tradisional, hingga meningkatnya kerentanan sosial dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pengalaman masyarakat lokal tidak hanya diposisikan sebagai dampak, tetapi sebagai bagian dari narasi penting yang menunjukkan bagaimana mereka merespons, beradaptasi, bahkan melakukan resistensi terhadap perluasan industri tambang.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian etnografi kritis, yaitu etnografi konvensional yang dilakukan untuk menggambarkan analisis terhadap makna mendasar tentang ketidakseimbangan dalam perubahan yang dialami masyarakat lokal akibat adanya industri tambang. Dari pandangan penelitian etnografi kritis oleh Jurgen Habermas (1971, dalam Madison, 2005: 6), pada pandangan ketiga yaitu critical theory diartikan sebagai penelitian yang menganalisis kehidupan sosial dan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial baik secara budaya atau politik. Pandangan ketiga ini merupakan pangkal lahirnya etnografi kritis. Oleh karena itu etnografi kritis diartikan penerapan teori kritis dalam sebuah penelitian (Madison, 2005: 6).

Dalam praktiknya, menurut Creswell (2008) etnografi kritis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk membantu, mencerahkan dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang termajinkan. Sesuai dengan konteks penelitian, pendekatan etnografi kritis ini dapat menjadi pegangan kuat bagi penulis untuk bisa memberikan pencerahan yang bertujuan memulihkan ketidakseimbangan atau yang berkontribusi dalam tindakan penelitian.

2.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, dengan tujuan untuk melakukan studi etnografi guna memahami konsekuensi sosio-ekologis dari aktivitas industri tambang di wilayah tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kehadiran industri ekstraktif, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan hauling, telah memicu perubahan ekologis yang berdampak pada tatanan sosial masyarakat lokal. Studi ini secara khusus bertujuan untuk menelusuri secara mendalam realitas sosial di balik perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan tradisional menuju ketergantungan pada sektor pertambangan, serta mengungkap bagaimana dinamika ini menciptakan kerentanan ekonomi, terutama bagi kelompok perempuan, lansia, dan petani kecil. Lebih jauh, penelitian etnografi ini hendak memotret secara holistik bagaimana masyarakat Kapoiala mengalami dan merespons ketidakadilan ekologis dan sosial, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan lokal dan risiko kesehatan jangka panjang, sebagai konsekuensi langsung dari industrialisasi berbasis ekstraksi sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka. penelitian ini dilakukan mulai dari

2.3 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan mencakup:

1. Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area pertambangan (petani tambak, pekerja tambang, perempuan).
2. Tokoh masyarakat atau pemimpin komunitas yang memahami dinamika sosial dan budaya setempat.
3. Perwakilan dari pihak pemerintah desa atau kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan dampak tambang.
4. Pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait perubahan sosial-ekologis akibat tambang.

Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan prinsip kecukupan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh dianggap telah mewakili fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019:133), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau memiliki kompetensi tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti tidak berfokus pada jumlah, melainkan pada kedalaman informasi yang diperoleh.

Informan yang diwawancarai berjumlah 12 orang, dengan waktu kegiatan wawancara dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Proses menemukan informan terbilang cukup cepat, dengan mengamati lingkungan sekitar dan juga berinteraksi dengan masyarakat seperti yang dilakukan mendatangi rumah warga dan juga beberapa warung. Sekedar membeli minuman dan bertanya kepada penjual yang sudah lama tinggal di Kecamatan Kapoiala. Dalam proses penelitian, peneliti juga bertemu dengan warga lokal yang ikut menggugat persoalan lingkungan yang mereka hadapi, dalam hal ini mereka sebagai warga terdampak yakni petani tambak dan nelayan. Kemudian dalam proses wawancara bersama Camat Kapoiala, kebetulan bersamaan dengan kegiatan persiapan acara agustusan. Disana peneliti mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam aktivis lingkungan. Selain itu, warga-warga lokal yang juga terlibat langsung dan merasakan dampak sosial-ekologi seperti pekerja tambang. Dalam penelitian ini tidak ada nama informan yang disamarkan, karena para informan bersedia untuk dicantumkan nama aslinya. Berikut adalah nama-nama informan dalam penelitian, diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Daftar Nama-nama Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Muh. Shobri Rustam	52 Tahun	Camat Kapoiala
2	Anas Padil	32 Tahun	Petani
3	Sahir	50 Tahun	Nelayan

4	Nasir	54 Tahun	Nelayan
5	Rusdin	47 Tahun	petani
6	Amir	57 Tahun	Petani
7	Kamriadi	35 Tahun	Petani
8	Nurung	51 Tahun	Penjual Ikan
9	Erni	46 Tahun	Ibu Rumah Tangga
10	Suwarni	38 Tahun	Ibu Rumah Tangga
11	Suruddin	54 Tahun	Petani
12	Awal	32 Tahun	Karyawan Tambang

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan studi etnografi yang berfokus pada pengalaman hidup masyarakat lokal di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, khususnya dalam merespons dan beradaptasi terhadap kehadiran industri tambang di lingkungan mereka. Untuk memahami secara mendalam proses adaptasi sosial dan ekologis tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

Dalam studi etnografi ini, observasi partisipatif dilakukan secara sistematis dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai dinamika sosio-ekologis di Kapoiala. Fokus observasi diarahkan pada dua aspek utama, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan masyarakat lokal. Pada aspek ekonomi, peneliti menyoroti relasi kuasa dan akses yang terbentuk antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam konteks kesejahteraan komunitas lokal. Sementara itu, pada aspek lingkungan, peneliti mengamati secara langsung berbagai bentuk kerusakan ekologis seperti degradasi lahan pertanian, pencemaran udara, air, dan tanah yang berdampak pada permukiman warga. Proses ini dilakukan agar peneliti dapat menemukan dan memahami secara utuh konsekuensi sosio-ekologis dari industrialisasi tambang, khususnya bagaimana perubahan lingkungan yang semakin memburuk turut membentuk ulang tata ruang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kapoiala

2.3.1 Observasi Partisipatif

Creswell, J.W (2018) menjelaskan metode penelitian kualitatif berbasis observasi partisipatif sebagai pendekatan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait konteks dampak sosial dan lingkungan. Mengacu pada pandangan ini, observasi partisipatif relevan digunakan sebagai metode yang efektif karena peneliti ikut merasakan langsung kondisi lingkungan yang sedang dihadapi masyarakat lokal akibat industri tambang. Proses ini dapat membantu peneliti mencatat, menggali dan memahami data lebih mendalam terkait dengan konsekuensi industri tambang dalam mempengaruhi kehidupan komunitas lokal di Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe.

Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi dengan mengikuti kegiatan atau aktivitas masyarakat sehari-hari. Seperti menjual ikan di depan rumah berhadapan

langsung dengan jalan hauling. Proses partisipasi ini dilakukan dengan duduk bersama penjual ikan, bercerita sembari menunggu pembeli atau para pekerja tambang untuk membeli. Partisipasi ini menyadarkan peneliti tentang bagaimana masyarakat lokal menghadapi dampak industri tambang seperti polusi debu yang muncul tanpa henti akibat kendaraan berat yang melewati jalan tersebut terus menerus hingga mengupas lapisan tanah. Di tengah ekonomi yang mengharuskan mereka tetap bekerja dalam tekanan ekologis, kondisi ini memberikan pemahaman bahwa keberadaan industri tambang di Kapoiala telah menciptakan ketimpangan sosial, dimana perusahaan tambang menyebabkan ketidakseimbangan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya.

2.3.2 Wawancara mendalam

Data wawancara mendalam juga diperlukan sebagai salah satu metode penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara rinci mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan partisipan terkait isu penelitian ini. Sebagaimana dalam konteks penelitian, wawancara mendalam dapat membantu peneliti memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat keberadaan industri tambang.

Penelitian ini mengacu pada Creswell (2014) mengemukakan bahwa wawancara mendalam merupakan teknik yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami perspektif informan secara lebih mendalam. Creswell menekankan wawancara mendalam memberikan peneliti fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka dan mendalam. Demikian dalam penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan memperoleh data lebih luas terkait fenomena yang sedang diteliti.

Adapun proses wawancara mendalam yang dilakukan dimulai dengan mendatangi keberadaan informan yang dipilih kemudian memperkenalkan diri, proses ini membangun kepercayaan untuk mendapat kesediaannya masyarakat menceritakan pengalaman hidup atau yang dirasakan terkait dengan adanya industri tambang di Kecamatan Kapoiala. Sebelum itu, peneliti telah merancang daftar pertanyaan semi-terstruktur seperti bagaimana pengalaman hidup mereka sebelum dan sesudah kehadiran tambang?, bagaimana akses pekerjaan yang diberikan perusahaan tambang?, bagaimana kondisi lahan pertanian dan perkebunan sebelum dan sesudah adanya industri tambang?, bagaimana mereka awalnya mengalami masalah kesehatan yang diduga disebabkan oleh perubahan kualitas udara akibat aktivitas tambang?, bagaimana keberadaan tambang menyebabkan perubahan dalam hubungan sosial di masyarakat, seperti konflik antarwarga atau perubahan sosial budaya?.

Beberapa pertanyaan di atas akan diajukan pada informan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh industri tambang seperti pencemaran air, udara dan tanah. Dalam proses tersebut peneliti menemukan data akurat mengenai keberadaan industri tambang, menyebabkan perubahan ekonomi yang mempengaruhi akses lapangan kerja, pendapatan, hingga sampai dengan

kehilangan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kapoiala. Seperti halnya ketika masuknya industri tambang di wilayah ini, perusahaan tetap menyediakan lapangan kerja, namun akses dan keuntungannya hanya diperoleh tambang. Sementara itu, masyarakat lokal menerima dampak sosial-ekologis, dengan arti lain masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan ketergantungan ekonomi terhadap industri yang sewaktu-waktu bisa menghentikan mereka dari pekerjaan di tambang. Selain itu, kondisi lingkungan yang telah mengalami kerusakan parah menimbulkan lahan produktivitas masyarakat lokal sebagai pengelola tambak tidak menentu, karena lahan mereka yang tidak dapat dikelola dengan baik seperti sebelum hadirnya industri tambang.

2.3.3 Dokumentasi

Bagian dokumentasi juga sangat penting dalam penelitian ini, khususnya untuk mengungkapkan kondisi dampak lingkungan dari industri tambang di Kecamatan Kapoiala. Dokumentasi penelitian ini mencakup data realitas lapangan yang menggambarkan Lokasi penelitian didalamnya terdapat wilayah pemukiman warga yang berhadapan langsung dengan area Kawasan pertambangan milik PT. OSS dan PT. VDNI. Dengan data ini, dapat membantu peneliti dalam menganalisis dampak sosial-ekologis secara kompleks dan komprehensif.

Dokumentasi jalan hauling berfokus pada dampak polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan berat melintasi jalur utama produksi dari pusat Perusahaan ke Pelabuhan jetty. Dokumentasi ini sangat penting dikaitkan dalam analisis beberapa dampak yang dirasakan oleh Masyarakat lokal, terutama keberadaannya yang berada dan berhadapan langsung dengan ekonomi lokal, lahan pertanian tambak di sekitaran jalan menjadi sasaran dari dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan ini. Dalam proses ini, peneliti juga menemukan tantangan saat melintasi jalan, melihat kendaraan tambang yang melintas sangat banyak dan beberapa melintas dengan kecepatan normal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena arenanya yang sangat rentan menciptakan kecelakaan bagi pengendara bermotor. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan fokus yang kuat untuk bisa melewati jalan tersebut dengan mengambil dokumentasi secara sigap dan tepat dalam mengumpulkan data lapangan yang relevan.

Dengan berbagai dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang nyata dan komprehensif tentang konsekuensi sosial-ekologis dari industri tambang di wilayah tersebut. Beberapa dokumentasi tidak hanya memberikan bukti konkret tentang dampak yang dirasakan oleh Masyarakat lokal, tetapi juga memberikan rekomendasi yang berbasis data alamiah untuk pengembangan penelitian etnografi yang lebih inklusif dan relevan.

2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Spradley (1979), analisis melibatkan identifikasi dan pengorganisasian kategori dari data yang diperoleh. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah langkah-langkah yang telah ditentukan untuk membantu menyederhanakan data yang dikumpulkan. Langkah pertama yakni analisis domain,

dalam penelitian studi etnografi perlu menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi dan mengorganisir objek yang relevan dari seluruh data yang dikumpulkan. Proses ini dilakukan agar peneliti dapat menemukan dan memahami hubungan antar kategori terkait dengan konteks sosial yang ingin diteliti.

Selanjutnya analisis taksonomi, dalam penelitian studi etnografi ini akan digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengorganisir data ke dalam kategori-kategori yang terstruktur. Analisis data ini bertujuan untuk membantu mengetahui domain secara lebih rinci dan mendalam. Sebagaimana analisis taksonomi membantu mengorganisir data yang kompleks dalam struktur yang lebih teratur dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Demikian analisis ini memungkinkan peneliti untuk mudah melihat pola atau hubungan antar kategori dan subkategori, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Langkah selanjutnya analisis komponensial, dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami komponen-komponen dasar atau elemen-elemen yang membentuk suatu fenomena yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada cara untuk memecah data yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami, dianalisis, dan digabungkan kembali saat melihat pola, hubungan, atau makna yang lebih besar. Misalnya dampak lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air dan tanah), analisis komponensial ini akan bertujuan untuk membantu peneliti mengkategorikan faktor-faktor penyebab setiap kerusakan lingkungannya sehingga ini memungkinkan peneliti dapat menemukan dan memahami keberadaan tambang dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal di Kecamatan Kapoiala.

Selanjutnya analisis tema kultural, dalam penelitian kualitatif merujuk pada teknik yang digunakan untuk menggali, mengidentifikasi, dan memahami elemen-elemen budaya yang muncul dalam data. Analisis data ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi perilaku dan pandangan masyarakat lokal dalam melihat konteks konsekuensi industri tambang bagi komunitas lokal di Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema budaya, memungkinkan peneliti dapat memberikan pemahaman holistik tentang dampak industri tambang yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal. Demikian teknik analisis data yang akan dilakukan dari awal hingga akhir proses penelitian, ini diharapkan dapat membantu peneliti memahami, menemukan dan menentukan kesimpulan yang sesuai atau relevan dengan konteks sosial.

Kemudian dalam tahapan menentukan kesimpulan, Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa menetapkan kesimpulan adalah langkah krusial untuk mengintegrasikan berbagai temuan menjadi satu narasi yang kohesif. Kesimpulan yang jelas memungkinkan peneliti untuk menyampaikan implikasi praktis dan teoritis dari penelitian. Kemudian Lincoln dan Guba (1985), mereka menekankan bahwa keabsahan data sangat penting untuk memastikan kredibilitas penelitian kualitatif.

Dari berbagai pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini sangat diperlukan karena bertujuan untuk membantu memudahkan proses

pengumpulan data, analisis data dan menetapkan kesimpulan. Demikian dalam proses menyajikan hasil penelitian studi etnografi, peneliti juga akan melakukan triangulasi, audit trail, dan member checking untuk meningkatkan keabsahan data. Hal ini dilakukan peneliti agar penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan dan keabsahan data yang akurat dan relevan, serta dapat mendeskripsikan dan memberikan pemahaman secara jelas dan mendalam terkait data yang diperoleh.

Penarikan dan verifikasi kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat final sejak awal, melainkan berkembang seiring dengan proses pengumpulan dan analisis data di lapangan. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan dengan berbagai sumber data, teori yang relevan, serta hasil konfirmasi kepada informan (member check) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kenyataan yang dialami masyarakat.

Keseluruhan proses analisis penelitian ini pada akhirnya sesuai penyusunan narasi etnografi yang komprehensif, tidak hanya mendeskripsikan realitas empiris di lapangan, tetapi juga memberikan penjelasan kritis mengenai hubungan antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan dalam konteks industri ekstraktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik ekologis secara akademis politik dalam kajian pengembangan, maupun secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.